



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HK.01.07/MENKES/4626/2021

TENTANG

LOKUS KEGIATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
DAN ANGKA KEMATIAN BAYI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi di Indonesia sehingga penurunan angka kematian ibu, dan angka kematian bayi menjadi target pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi perlu dukungan dan kerjasama lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terfokus pada lokus kegiatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
 - c. bahwa Kementerian Kesehatan telah menetapkan lokus kegiatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tahun 2020 dan 2021 dan perlu dilakukan evaluasi serta penetapan lokus kegiatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi untuk tahun 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lokus Kegiatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG LOKUS KEGIATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan 320 (tiga ratus dua puluh) kabupaten/kota pada 34 (tiga puluh empat) provinsi sebagai lokus kegiatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan 320 (tiga ratus dua puluh) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan 200 (dua ratus) kabupaten/kota lokus kegiatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tahun 2021 ditambah 120 (seratus dua puluh) kabupaten/kota lokus kegiatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tahun 2022;

KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022;

- KEEMPAT : Dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada 320 (tiga ratus dua puluh) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Bupati/Walikota bertugas:
- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan AKI dan AKB; dan
 - d. memperkuat tata kelola meliputi tata kelola manajemen, tata kelola program dan tata kelola klinis.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR: HK.01.07/MENKES/4626/2021
TENTANG LOKUS KEGIATAN PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA
KEMATIAN BAYI TAHUN 2022

DAFTAR 320 KAB/KOTA LOKUS PERCEPATAN PENURUNAN AKI DAN AKB
TAHUN 2022

Provinsi	Kab/Kota Lokus Tahun 2020-2021		Penambahan Kab/Kota Lokus Tahun 2022	
Aceh	1	Kab. Pidie	1	Kab. Simeulue
	2	Kab. Bireun	2	Kab. Aceh Singkil
	3	Kab. Aceh Utara	3	Kab. Aceh Tenggara
	4	Kab. Nagan Raya	4	Kab. Aceh Tengah
	5	Kab. Aceh Selatan	5	Kab. Aceh Besar
	6	Kab. Aceh Timur	6	Kab. Aceh Barat Daya
Sumatera Utara	7	Kab. Deli Serdang	7	Kab. Langkat
	8	Kab. Mandailing Natal	8	Kab. Pakpak Barat
	9	Kab. Asahan	9	Kota Pematang Siantar
	10	Kab. Nias Selatan		
	11	Kab. Nias Barat		
	12	Kab. Labuhanbatu		
Sumatera Barat	13	Kota Padang	10	Kab. Lima Puluh Kota
	14	Kab. Pasaman Barat	11	Kota Sawah Lunto
	15	Kab. Pesisir Selatan	12	Kota Payakumbuh
	16	Kab. Agam		
	17	Kab. Kep. Mentawai		
	18	Kab. Solok		
	19	Kab. Sijunjung		
Riau	20	Kab. Rokan Hilir	13	Kab. Kampar
	21	Kab. Pelalawan	14	Kab. Bengkalis
	22	Kab. Kuantan Sengigi	15	Kota Pekanbaru
	23	Kab. Kep. Meranti		
	24	Kota Dumai		
Jambi	25	Kab. Tanjung Jabung Timur	16	Kab. Kerinci
	26	Kab. Merangin	17	Kab. Sarolangun

Provinsi	Kab/Kota Lokus Tahun 2020-2021		Penambahan Kab/Kota Lokus Tahun 2022	
	No	Nama	No	Nama
			18	Kab. Tebo
Sumatera Selatan	27	Kab. Banyuasin	19	Kab. Lahat
	28	Kab. Musi Banyuasin		
	29	Kab. Musi Rawas Utara		
	30	Kab. Ogan Komering Ulu		
Bengkulu	31	Kab. Seluma	20	Kab. Bengkulu Selatan
	32	Kab. Bengkulu Utara	21	Kab. Lebong
	33	Kab. Kepahiang		
Lampung	34	Kota Bandar Lampung	22	Kab. Tanggamus
	35	Kab. Mesuji	23	Kab. Lampung Timur
	36	Kab. Pringsewu		
Kep. Riau	37	Kota Batam	24	Kab. Bintan
	38	Kab. Karimun	25	Kab. Natuna
			26	Kab. Lingga
			27	Kota Tanjung Pinang
Kep. Babel	39	Kab. Bangka Selatan	28	Kab. Bangka Tengah
	40	Kab. Belitung Timur	29	Kab. Bangka Barat
	41	Kab. Belitung		
DKI Jakarta	42	Kota Jakarta Barat	30	Kab. Kepulauan Seribu
	43	Kota Jakarta Timur		
	44	Kota Jakarta Utara		
	45	Kota Jakarta Pusat		
Jawa Barat	46	Kab. Indramayu	31	Kota Bogor
	47	Kab. Bogor		
	48	Kab. Garut		
	49	Kab. Sukabumi		
	50	Kab. Karawang		
	51	Kab. Bandung		
	52	Kab. Bandung Barat		
	53	Kab. Cirebon		
	54	Kab. Purwakarta		
	55	Kota Bandung		
	56	Kab. Tasikmalaya		
	57	Kab. Bekasi		
	58	Kab. Subang		
59	Kab. Cianjur			

Provinsi	Kab/Kota Lokus Tahun 2020-2021		Penambahan Kab/Kota Lokus Tahun 2022	
	60	Kab. Kuningan		
	61	Kota Bekasi		
	62	Kota Depok		
	63	Kota Tasikmalaya		
	64	Kab. Ciamis		
	65	Kab. Majalengka		
	66	Kab. Sumedang		
	67	Kota Cimahi		
	68	Kota Banjar		
	69	Kota Sukabumi		
	70	Kab. Pangandaran		
Jawa Tengah	71	Kab. Grobogan	32	Kab. Banjarnegara
	72	Kab. Brebes	33	Kab. Kebumen
	73	Kab. Demak	34	Kab. Purworejo
	74	Kab. Cilacap	35	Kab. Wonosobo
	75	Kab. Batang	36	Kab. Magelang
	76	Kota Semarang	37	Kab. Sukoharjo
	77	Kab. Banyumas	38	Kab. Wonogiri
	78	Kab. Kendal	39	Kab. Karanganyar
	79	Kab. Pemalang	40	Kab. Jepara
	80	Kab. Boyolali	41	Kab. Semarang
	81	Kab. Sragen	42	Kab. Temanggung
	82	Kab. Klaten	43	Kab. Pekalongan
	83	Kab. Blora	44	Kota Magelang
	84	Kab. Tegal	45	Kota Surakarta
	85	Kab. Purbalingga		
	86	Kab. Rembang		
	87	Kab. Pati		
	88	Kab. Kudus		
DI Yogyakarta	89	Kab. Bantul	46	Kab. Sleman
	90	Kab. Gunung Kidul	47	Kota Yogyakarta
Jawa Timur	91	Kab. Jember	48	Kab. Pacitan
	92	Kota Surabaya	49	Kab. Ponorogo
	93	Kab. Pasuruan	50	Kab. Trenggalek
	94	Kab. Bojonegoro	51	Kab. Blitar
	95	Kab. Banyuwangi	52	Kab. Nganjuk
	96	Kab. Sidoarjo	53	Kab. Madiun
	97	Kab. Pamekasan	54	Kab. Ngawi

Provinsi	Kab/Kota Lokus Tahun 2020-2021		Penambahan Kab/Kota Lokus Tahun 2022	
	98	Kab. Gresik	55	Kab. Tuban
	99	Kab. Bondowoso	56	Kab. Lamongan
	100	Kab. Mojokerto	57	Kota Blitar
	101	Kab. Tulungagung	58	Kota Malang
	102	Kab. Jombang	59	Kota Probolinggo
	103	Kab. Kediri		
	104	Kab. Malang		
	105	Kab. Lumajang		
	106	Kab. Sampang		
	107	Kab. Situbondo		
	108	Kab. Magetan		
	109	Kab. Probolinggo		
	110	Kab. Bangkalan		
Banten	111	Kab. Serang		
	112	Kab. Lebak		
	113	Kab. Tangerang		
	114	Kab. Pandeglang		
	115	Kota Serang		
	116	Kota Cilegon		
	117	Kota Tangerang Selatan		
	118	Kota Tangerang		
Bali	119	Kab. Karang Asem	60	Kab. Jembrana
	120	Kab. Tabanan	61	Kab. Badung
	121	Kab. Bangli	62	Kab. Gianyar
	122	Kab. Buleleng	63	Kab. Klungkung
NTB	123	Kab. Lombok Timur	64	Kab. Lombok Barat
	124	Kab. Lombok Tengah	65	Kab. Sumbawa
	125	Kab. Bima	66	Kab. Sumbawa Barat
	126	Kab. Lombok Utara	67	Kota Mataram
NTT	127	Kab. Timor Tengah Selatan	68	Kab. Sumba Timur
	128	Kab. Kupang	69	Kab. Timor Tengah Utara
	129	Kab. Sumba Barat Daya	70	Kab. Belu
			71	Kab. Lembata
			72	Kab. Flores Timur
			73	Kab. Sikka
			74	Kab. Manggarai Barat

Provinsi	Kab/Kota Lokus Tahun 2020-2021		Penambahan Kab/Kota Lokus Tahun 2022	
	No	Nama	No	Nama
			75	Kab. Manggarai Timur
			76	Kab. Sumba Tengah
			77	Kab. Nagekeo
Kalimantan Barat	130	Kab. Kubu Raya	78	Kab. Bengkayang
	131	Kab. Sintang	79	Kab. Sekadau
	132	Kab. Sambas		
	133	Kab. Sanggau		
	134	Kab. Ketapang		
	135	Kab. Melawi		
	136	Kab. Kapuas Hulu		
	137	Kab. Kayong Utara		
Kalimantan Tengah	138	Kab. Kotawaringin Timur	80	Kab. Lamandau
	139	Kab. Kotawaringin Barat		
	140	Kab. Murung Raya		
Kalimantan Selatan	141	Kab. Kotabaru	81	Kab. Tanah Laut
	142	Kab. Balangan	82	Kab. Banjar
	143	Kab. Hulu Sungai Selatan	83	Kab. Tapin
	144	Kab. Hulu Sungai Utara	84	Kab. Hulu Sungai Tengah
			85	Kab. Tabalong
			86	Kab. Tanah Bumbu
			87	Kota Banjarmasin
Kalimantan Timur	145	Kab. Kutai Kartanegara	88	Kab. Kutai Barat
	146	Kab. Berau	89	Kab. Kutai Timur
	147	Kab. Paser	90	Kab. Penajam Paser Utara
			91	Kab. Mahakam Ulu
			92	Kota Balikpapan
Kalimantan Utara	148	Kab. Nunukan	93	Kota Tarakan
	149	Kab. Bulungan		
	150	Kab. Malinau		
	151	Kab. Tana Tidung		
Sulawesi Utara	152	Kab. Kep. Talaud	94	Kab. Minahasa Selatan
	153	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
	154	Kab. Bolaang Mongondow Selatan		

Provinsi	Kab/Kota Lokus Tahun 2020-2021		Penambahan Kab/Kota Lokus Tahun 2022	
Sulawesi Tengah	155	Kab. Banggai Kepulauan	95	Kab. Banggai
	156	Kab. Donggala	96	Kab. Morowali
	157	Kab. Sigi	97	Kab. Poso
	158	Kab. Buol	98	Kab. Parigi Moutong
	159	Kab. Toli-Toli	99	Kab. Tojo Una-Una
	160	Kab. Banggai Laut	100	Kab. Morowalo Utara
			101	Kota Palu
Sulawesi Selatan	161	Kab. Gowa	102	Kab. Sidenreng Rappang
	162	Kab. Jeneponto	103	Kab. Luwu
	163	Kab. Pangkajene Kep.	104	Kab. Luwu Utara
	164	Kab. Sinjai	105	Kab. Luwu Timur
	165	Kab. Toraja Utara		
	166	Kab. Enrekang		
	167	Kab. Bulukumba		
Sulawesi Tenggara	168	Kab. Bombana	106	Kab. Muna Barat
	169	Kab. Konawe Selatan	107	Kab. Kolaka Timur
	170	Kab. Buton		
	171	Kab. Buton Utara		
	172	Kab. Konawe Utara		
	173	Kab. Buton Selatan		
	174	Kab. Kolaka		
Gorontalo	175	Kab. Pohuwato	108	Kab. Gorontalo
	176	Kab. Boalemo	109	Kab. Gorontalo Utara
	177	Kab. Bone Bolango	110	Kota Gorontalo
Sulawesi Barat	178	Kab. Polewali Mandar	111	Kab. Mamuju Utara
	179	Kab. Mamuju		
	180	Kab. Majene		
Maluku	181	Kab. Maluku Tengah	112	Kota Tual
	182	Kab. Maluku Tenggara	113	Kab. Kepulauan Aru
	183	Kab. Buru		
	184	Kab. Seram Bagian Timur		
	185	Kab. Buru Selatan		
	186	Kab. Maluku Tenggara Barat		
	187	Kab. Maluku Barat Daya		

Provinsi	Kab/Kota Lokus Tahun 2020-2021		Penambahan Kab/Kota Lokus Tahun 2022	
Maluku Utara	188	Kab. Kep. Sula	114	Kab. Halmahera Selatan
	189	Kab. Kota Tidore Kep,	115	Kab. Halmahera Timur
	190	Kab. Halmahera Barat	116	Kab. Pulau Morotai
	191	Kab. Halmahera Utara		
Papua Barat	192	Kab. Manokwari	117	Kab. Sorong Selatan
	193	Kab. Fak-Fak		
	194	Kab. Teluk Bintuni		
	195	Kab. Sorong		
Papua	196	Kab. Mimika	118	Kab. Nabire
	197	Kab. Merauke	119	Kab. Kepulauan Yapen
	198	Kab. Asmat	120	Kab. Keerom
	199	Kab. Boven Digoel		
	200	Kab. Mappi		

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002